



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Pemikiran	5
<b>BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN</b>	25
A. Tingkat Global	25
B. Perkembangan Masalah Lingkungan di Tingkat Nasional	44
<b>BAB III PENGERTIAN BEBERAPA KONSEP LINGKUNGAN</b>	61
A. Asas, Tujuan, dan Ruang-Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61
B. Makna Asas dalam Penegakan Hukum Lingkungan	67
C. Peranan Konferensi Internasional Terhadap Munculnya Asas Lingkungan	73
D. Makna Lingkungan & Hukum Lingkungan	77
E. Makna Penegakan Hukum	79
F. Unsur Melawan Hukum dan Melanggar Ketentuan Perundang-undangan	133
G. Hukum Materil dan Hukum Formal	134
H. Aparat Penegak Hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009	134
I. Undang-undang Lingkungan Hidup Merupakan Aturan Khusus	135
J. Dapat Dihukumnya Badan Hukum (Korporasi)	136
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (ENVIRONMENT ENFORCEMENT)</b>	159
A. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	159
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	163
C. Penegakan Hukum Administrasi	178
D. Penegakan Hukum Perdata	194
E. Penegakan Hukum Pidana	217
F. Kebijakan Pemidanaan & Pedoman Pemidanaan	260

	G. Tujuan Pemidanaan	263
	H. Kelemahan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	264
<b>BAB V</b>	<b>PANDANGAN AHLI TENTANG ASAS SUBSIDIARITAS YANG DIUBAH MENJADI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN</b>	<b>275</b>
<b>BAB VI</b>	<b>ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PRAKTIK PERADILAN</b>	<b>287</b>
	A. Praktik Peradilan yang Berkaitan dengan Asas Subsidiaritas dan Penerapan Delik Formal	287
	B. Pendapat Lembaga Penegak Hukum Terhadap Penerapan Delik Formal	296
	C. Pendapat Majelis Hakim Terhadap Delik Formal	298
	D. Pendapat Aparat Penegak Hukum Terhadap Penerapan Delik Formal	301
	E. Analisis Terhadap Praktik Peradilan	315
	F. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan	324
	G. Analisis Terhadap Pendapat Aparat Penegak Hukum Dihubungkan dengan Praktik Peradilan Terhadap Penegakan Delik Formal	332
	H. Faktor Penyebab Terbaikannya Hukum Acara Khusus Pada Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	333
	I. Pentingnya Asas Subsidiaritas Dipertahankan Pada UU Lingkungan	334
	J. Perubahan Undang-undang Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan	336
	K. Kelemahan Asas Ultimum Remedium dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	337
	L. Usulan Prosedur Penanganan Delik Formal Pada Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	340
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>345</b>
	A. Kesimpulan	345
	B. Saran	345
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>347</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>357</b>